

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran telah menjadi isu krusial di berbagai sektor, termasuk sektor publik, karena berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana organisasi mengalokasikan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran mereka menjadi penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efektif.

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan pemerintahan yang menuntut standar administrasi yang baik dan mengharuskan setiap asosiasi menyelesaikan pelaksanaan rencana belanja dengan tepat dan akurat, sehingga setiap program dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran ditentukan oleh bagaimana penggunaan anggaran menyesuaikan dengan pengaturan yang telah ditetapkan.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa anggaran merupakan instrumen tanggung jawab, manajemen dan strategi moneter untuk mengakui perkembangan keuangan yang stabil dan distribusi gaji yang setara. Rencana keuangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas/Organisasi (K/L) dan Satuan Kerja (Satker) penunjang daerah.

Pengelolaan Anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman tersebut

bermakna bahwa sistem akuntansi publik merupakan pengembangan dari metodologi manual dan elektronik mulai dari pengumpulan informasi, pencatatan, penjumlahan, dan perincian posisi moneter dan tugas keuangan pemerintah.

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka, atau di lokasi manapun pasti terdapat tantangan yang bervariasi, tetapi beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi oleh BPS di tingkat kabupaten termasuk keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam pengumpulan data, peningkatan akurasi data, integrasi data, pelatihan dan pengembangan kapasitas, kepentingan masyarakat, teknologi dan keamanan data, perubahan dalam kebijakan dan kebutuhan data. Pemahaman dan penanganan tantangan-tantangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas SSN di tingkat kabupaten seperti Kabupaten Majalengka atau di daerah lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pada BPS Kabupaten Majalengka tidak dapat dihindarkan dengan ketidaksesuaian penyerapan pengelolaan anggaran dengan realisasinya. Meskipun kesiapan penyusunan rencana keuangan BPS Kabupaten Majalengka telah dilakukan dengan baik dan sesuai sistem yang ada, namun hal ini masih belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan

ketidaksesuaian pengelolaan anggaran antara realisasi anggaran dengan pengalokasiannya.

Penyelenggaraan pelayanan prima dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) sangat penting karena Sistem Statistik Nasional (SSN) bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data statistik yang digunakan oleh pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan anggaran yang baik dapat berdampak positif terhadap pelayanan prima. Sebagai contoh, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan prima. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Adanya pengelolaan penggunaan anggaran, instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini dapat mencakup peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kecepatan layanan, dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa pengelolaan anggaran keuangan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pelayanan prima. Terdapat faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan regulasi yang baik yang juga berperan penting dalam penyediaan pelayanan publik yang prima.

Berkaitan dari apa yang telah dijelaskan tersebut, Badan Pusat Statistik Majalengka pada Anggaran pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN masih belum terealisasikan dengan maksimal 100%, serta terdapat naik turunnya presentase dimana realisasi penyerapan dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan 2022. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan anggaran pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka serta realisasinya pada Tahun Anggaran 2020-2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1. 1 Penganggaran Tahun 2020-2022 berdasarkan Sasaran Strategis “Penguatan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN”

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	2020	42.285.000	41.881.000	404.000	99,04%
2.	2021	30.190.000	30.190.000	0	100,00%
3.	2022	1.651.000	1.491.000	160.000	90,31%

Sumber: LAKIP BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada sasaran strategis penguatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04% dari pagu anggaran; realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 100,00% dari pagu anggaran; realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 90,31% dari pagu anggaran.

Keadaan ini, pemerintah daerah mempunyai rencana pengeluaran guna membuat suatu pengaturan yang merupakan suatu siklus untuk menentukan tujuan-

tujuan yang bersifat hierarkis yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang yang dijadikan alasan untuk mengendalikan pelaksanaan fungsionalnya, sehingga rencana keuangan menjadi tolok ukur untuk menyalurkan aset (moneter) untuk mensubsidi berbagai proyek dan pelaksanaan di Indonesia. Rencana Belanja Pendapatan dan Konsumsi Daerah (APBD) merupakan pembiayaan yang dilibatkan oleh otoritas publik dalam menjalankan pemerintahan. Melalui penggunaan informasi rekening yang terdapat dalam rencana belanja organisasi/perkumpulan pemerintah, akan terlihat apakah rencana keuangan yang disusun telah dimanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaannya. Hal ini juga berlaku di pemerintahan Kabupaten Majalengka khususnya di Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.

Suatu rencana pengeluaran yang telah disusun dengan sangat matang, sehingga kedua maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai secara produktif dan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan penilaian Eko Santoso (2011:2), dalam hal tanggung jawab, pemerintah daerah setempat harus menyederhanakan anggaran belanjanya secara finansial, efisien dan nyata untuk lebih mengembangkan kesejahteraan rakyat. Situasi ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka harus mempunyai pilihan untuk memperbaiki rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara tepat.

Mengingat gambaran mendasar di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu yang diakibatkan oleh pengelolaan anggaran. Judul yang dipilih oleh peneliti dalam penyusunan proposal ini adalah **“PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PELAYANAN**

PRIMA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJALENGKA”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan landasan tersebut, peneliti merencanakan permasalahan yang telah tergambar, sehingga fokus penelitiannya adalah:

1. Kurangnya penyerapan anggaran, karena masih terdapat program dalam sasaran strategis “Penguatan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN” terutama pada tahun 2022 yang belum terserap dengan baik yang masih dibawah 95% dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 Tahun 2015.
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan OPD (organisasi perangkat daerah) tentang penyelenggaraan statistik serta pemahaman terkait posisi BPS sebagai satker pembina statistik yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Mengingat landasan dan titik fokus penelitian di atas, maka rincian permasalahan yang akan dibawa oleh peneliti dapat dijelaskan secara eksplisit ke dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pengelolaan anggaran dan pelayanan prima dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka?
2. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan anggaran terhadap pelayanan prima pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka?

3. Seberapa besar pengaruh pengelolaan anggaran terhadap pelayanan prima pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap langkah atau kegiatan yang disusun mempunyai tujuan, maka penelitian yang dilakukan penulis juga mempunyai tujuan, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi dari pengelolaan anggaran dan pelayanan prima dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran mempengaruhi pelayanan prima dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui besar pengaruh pengelolaan anggaran terhadap pelayanan prima dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini penulis berharap nantinya bisa menjadi sarana untuk menambahnya keilmuan terutama terkait dengan konteks pengelolaan anggaran dan pelayanan prima dimana kedua teori itu didasarakkan pada sumber yang relevan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran sehingga target Badan Pusat Statistik akan mencapai tujuannya secara aktual dan efektif. Membina pemahaman peneliti, khususnya untuk menerapkan konsekuensi penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan anggaran terhadap pelayanan prima pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. Bagi peneliti atau penulis penelitian ini menjadi salah satu tugas untuk pemenuhan dalam mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo, pengelolaan anggaran yang baik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam pengelolaan anggaran, penting untuk berpegang pada pedoman insentif untuk *value for money*, yang menyiratkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus dipenuhi secara ekonomis, efektif dan efisien. Dimana menurut Mardiasmo juga menyatakan bahwa konsep *value for money* merupakan ide pengelolaan asosiasi kawasan publik yang bergantung pada tiga komponen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Kemajuan pengelolaan keuangan daerah masih belum jelas karena proses pengaturan yang mendasarinya. Semakin matang persiapannya maka semakin besar pula efek eksekusinya di lapangan.

Menurut Mardiasmo (2018:61), pengelolaan anggaran memiliki beberapa dimensi, yaitu: Dimensi Perencanaan: Merupakan dimensi yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang terdiri dari perencanaan pendapatan, perencanaan belanja program dan kegiatan serta perencanaan pembiayaan. RKA harus disusun secara terperinci, jelas, rinci dan komprehensif; Dimensi Pelaksanaan: Merupakan dimensi yang berkaitan dengan pelaksanaan RKA yang meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan aset; Dimensi Pengawasan: Merupakan dimensi yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan RKA yang meliputi pengawasan terhadap pendapatan, pengawasan terhadap belanja, pengawasan terhadap pembiayaan dan pengawasan terhadap aset.

Untuk menyusun anggaran, sebuah asosiasi harus terlebih dahulu mengembangkan tindakan yang dipikirkan dengan matang. Melalui persiapan yang penting, rencana pengeluaran mendapat kerangka acuan yang penting. Di sini, rencana pengeluaran menjadi penting sebagai distribusi aset (moneter) untuk mendukung berbagai proyek dan pelaksanaan.

Pelayanan prima adalah jenis kebutuhan atau minat dalam usaha bantuan dan pertukaran saat berhadapan dengan pembeli/klien. Dalam dunia bisnis, persaingan antar vendor sangat ketat. Hal ini kemudian membuat para pedagang perlu

memberikan dukungan yang layak kepada kliennya, karena jika mereka tidak memberikan bantuan yang besar maka kliennya akan beralih ke orang lain. Pelayanan prima adalah bantuan terbaik yang diberikan kepada klien, baik klien internal maupun eksternal ditinjau dari metodologi administrasi. Pelayanan prima adalah bantuan terbaik dan memenuhi asumsi dan kebutuhan klien. Secara keseluruhan, pelayanan prima adalah bantuan yang memenuhi pedoman mutu bantuan yang sesuai dengan asumsi dan pemenuhan klien/wilayah setempat.

Pelayanan prima adalah jenis kebutuhan atau minat terhadap bantuan dan usaha pertukaran saat berhadapan dengan pembeli/masyarakat. Hal ini kemudian membuat organisasi atau instansi yang menawarkan jenis bantuan yang sesuai dengan keinginan kliennya.

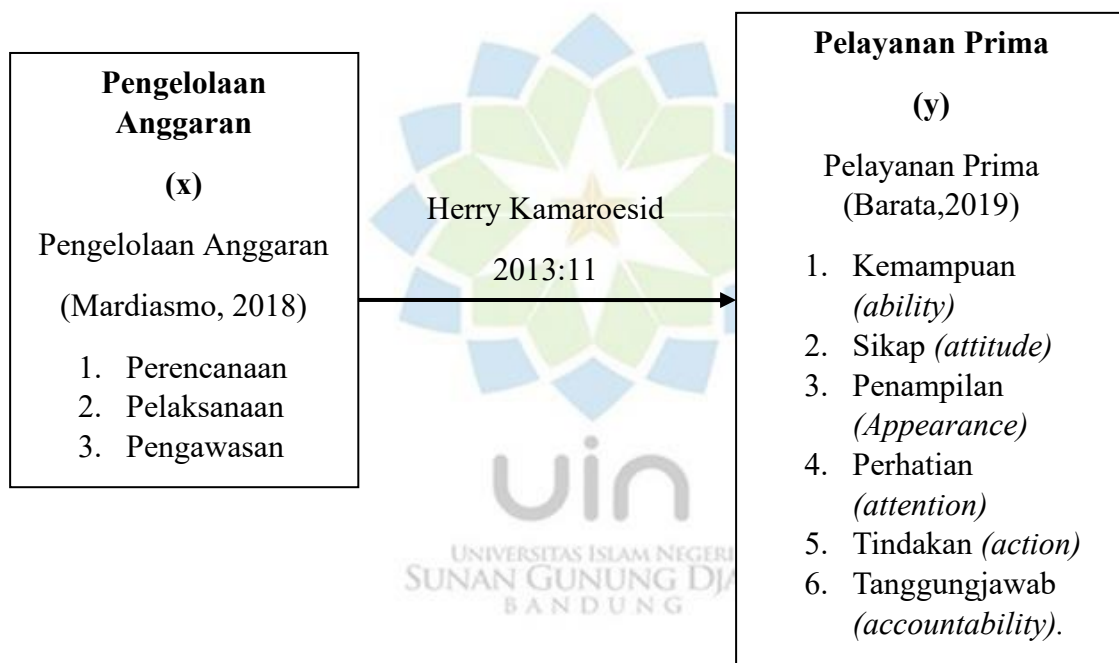
Menurut Barata 2019 mereferensikan memiliki pilihan untuk memberi pelayanan prima (*service excellence*) pegawai harus memperhatikan beberapa pokok yaitu kemampuan (*ability*), sikap (*attitude*), penampilan (*Appearance*), perhatian (*attention*), tindakan (*action*), dan tanggungjawab (*accountability*).

Pelayanan prima merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan negara. Pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pencapaian hasil merupakan salah satu perkiraan untuk menilai bagaimana setiap rencana belanja yang diawasi oleh satuan kerja (satker) pada suatu instansi dapat terwakili dengan baik. Pencapaian hasil juga merupakan salah satu data yang diharapkan dapat mengukur kemajuan penggunaan hasil yang diawasi oleh unit kerja untuk menentukan sejauh mana pelaksanaan proyek dan kegiatan

yang telah disusun dan diputuskan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara sangat penting.

Kerangka pemikiran di atas dapat direpresentasikan melalui Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Silalahi (2014:266) memahami suatu spekulasi adalah dugaan sementara tentang hubungan antara setidaknya dua faktor yang diacu. Pernyataan tentang hubungan ini telah direncanakan dalam sistem hipotetis. Penegasan adanya keterkaitan antar faktor seperti yang direncanakan dalam spekulasi merupakan anggapan yang tidak kekal terhadap suatu persoalan.

Berdasarkan asumsi diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. H_0 : Pengelolaan anggaran tidak berpengaruh terhadap pelayanan prima di Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.

H_1 : Pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap pelayanan prima di Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.

